

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal 2025, Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald J. Trump mendeklarasikan suatu keadaan darurat nasional di bidang ekonomi dan perdagangan yang menjadi dasar peluncuran paket tarif global yang dikenal sebagai *Liberation Day tariffs*. Melalui *Executive Order 14257* tanggal 2 April 2025, Amerika Serikat menerapkan tarif global yang bersifat "*reciprocal*" terhadap hampir semua mitra dagangnya, dengan struktur tarif yang dibedakan antara tarif dasar 10 persen dan tarif tambahan bagi negara yang dianggap memiliki hambatan perdagangan tinggi terhadap produk AS.¹

Bagi Indonesia, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tidak hanya menimbulkan persoalan perdagangan, tetapi juga menghadirkan tantangan kebijakan luar negeri. Sebagai negara yang selama ini berupaya menjaga hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat sekaligus mempertahankan ruang kebijakan nasional, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk merespons tekanan eksternal tanpa memperbesar kerentanan ekonomi domestik. Dalam konteks ini, kebijakan menerima atau menolak suatu skema perdagangan tidak dapat dibaca semata sebagai kalkulasi ekonomi, melainkan sebagai bagian dari pilihan kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengelola hubungan dengan kekuatan besar di tengah perubahan lingkungan perdagangan internasional.²

¹ Barath Harithas et al., "'Liberation Day' Tariffs Explained," Center for Strategic and International Studies, 2025, <https://www.csis.org/analysis/liberation-day-tariffs-explained>.

² IFG Progress, "Economic Bulletin – US Tariff Impact to Indonesia" (Jakarta, Indonesia, 2025), https://ifgprogress.id/wp-content/uploads/2025/04/Econ.-Bulletin-US-Tariff-Impact-to-Indonesia_vf.pdf.

Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memperoleh tarif tinggi. Analisis IFG Progress mencatat bahwa Indonesia dikenai tarif sebesar 32 persen terhadap ekspor barang ke Amerika Serikat, sebuah lonjakan tajam dibandingkan rata rata tarif sebelumnya yang relatif rendah, dan berpotensi menekan pertumbuhan ekspor Indonesia ke pasar Amerika.³ Sejumlah studi awal memperkirakan bahwa kebijakan ini tidak hanya mengancam kinerja ekspor, tetapi juga berimplikasi pada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kanal penurunan permintaan luar negeri dan tekanan terhadap industri padat karya yang sangat bergantung pada pasar Amerika.⁴

Ketegangan perdagangan ini memasuki fase penting pada 22 Juli 2025, ketika Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia mengumumkan *Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade*. Berbeda dari perjanjian final, dokumen ini merupakan kerangka kesepahaman yang memuat parameter utama perundingan lanjutan menuju *Agreement on Reciprocal Trade*. Dalam *joint statement* tersebut dinyatakan bahwa Amerika Serikat akan menurunkan tarif resiprokal atas barang asal Indonesia menjadi 19 persen, sementara Indonesia menyatakan komitmen untuk menghapus sekitar 99 persen hambatan tarif bagi berbagai produk industri, pangan, dan pertanian asal Amerika Serikat, disertai langkah-langkah penanganan atas sejumlah hambatan non-tarif yang selama ini dipersoalkan Washington. *Fact sheet* Gedung Putih yang dirilis pada tanggal yang sama menegaskan bahwa butir-butir tersebut

³ IFG Progress.

⁴ Maria Monica Wihardja dan Siwage Dharma Negara, "What the Weak Must Suffer: Indonesia's High-Cost Trade Deal with the US," FULCRUM (Singapore), 2025, <https://fulcrum.sg/what-the-weak-must-suffer-indonesias-high-cost-trade-deal-with-the-us/>.

masih akan dituangkan lebih lanjut ke dalam perjanjian yang berlaku efektif.⁵ Dengan demikian, secara konseptual, momen Juli 2025 lebih tepat dipahami sebagai lahirnya kerangka kesepakatan.

Dari sisi substansi, kerangka kesepakatan 22 Juli 2025 tetap menunjukkan konfigurasi yang cenderung asimetris. Di satu sisi, Indonesia memperoleh penurunan tarif dari ancaman awal 32 persen menjadi 19 persen. Namun di sisi lain, Indonesia menyampaikan komitmen pembukaan akses pasar yang luas bagi produk Amerika Serikat, termasuk penghapusan sebagian besar hambatan tarif serta penyesuaian terhadap sejumlah hambatan non-tarif, seperti tingkat kandungan dalam negeri, prosedur penilaian kesesuaian, pengakuan sertifikasi regulator Amerika Serikat, pembatasan impor, dan verifikasi pra-pengapalan. Dengan demikian, penerimaan Indonesia terhadap kerangka kesepakatan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil akhir negosiasi tarif, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan kebijakan perdagangan luar negeri.⁶

Dalam situasi tekanan tarif dari kekuatan ekonomi besar, Indonesia sebagai negara berkembang pada dasarnya dapat mempertahankan ruang kebijakan nasional melalui beberapa pilihan, seperti menunda penerimaan kesepakatan, menggunakan forum multilateral, melakukan retaliasi terbatas, atau mempertahankan kebijakan protektif tertentu untuk melindungi sektor domestik. Ekspektasi tersebut semakin relevan karena tarif 32 persen berpotensi menekan

⁵ The White House, "Fact Sheet: The United States and Indonesia Reach Historic Trade Deal," The White House, 22 Juli 2025, <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/07/fact-sheet-the-united-states-and-indonesia-reach-historic-trade-deal/>

⁶ The White House, "Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade," The White House, 22 Juli 2025, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/07/joint-statement-on-framework-for-united-states-indonesia-agreement-on-reciprocal-trade/>.

ekspor, mengganggu sektor padat karya, dan memperbesar tekanan terhadap stabilitas ekonomi domestik.

Namun, dinamika yang terjadi menunjukkan pola berbeda. Indonesia tidak menjadikan retaliasi atau gugatan multilateral sebagai jalur utama. Pemerintah Indonesia justru memilih negosiasi bilateral dan menerima kerangka kesepakatan yang tetap memuat relasi asimetris, yaitu penurunan tarif Amerika Serikat menjadi 19 persen dengan imbal balik berupa komitmen pembukaan pasar dan penyesuaian berbagai hambatan non-tarif oleh Indonesia. Perbedaan antara ekspektasi respons protektif dan realitas kebijakan akomodatif inilah yang menjadikan kasus ini penting untuk dianalisis sebagai proses pembentukan kebijakan.

Sejauh ini, pembahasan mengenai kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia lebih banyak menyoroti dampak ekonomi, tekanan terhadap sektor ekspor, atau besaran konsesi yang diberikan Indonesia. Kajian semacam itu penting, tetapi belum cukup menjelaskan bagaimana kebijakan Indonesia terbentuk dalam interaksi antara tekanan internasional dan dinamika domestik. Padahal, penerimaan Indonesia terhadap kerangka kesepakatan perdagangan resiprokal 2025 melibatkan proses yang tidak sederhana, mulai dari tekanan tarif Amerika Serikat, koordinasi antarkementerian, negosiasi bilateral, pengelolaan kepentingan sektor terdampak, hingga pembentukan legitimasi politik di dalam negeri.

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan penerimaan Indonesia terhadap kerangka kesepakatan perdagangan resiprokal dengan Amerika Serikat tahun 2025 sebagai proses pembentukan kebijakan luar negeri. Fokus penelitian bukan pada

penilaian apakah kerangka kesepakatan tersebut menguntungkan atau merugikan Indonesia, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut terbentuk melalui tahapan, interaksi aktor, ruang kompromi, dan mekanisme penerimaan domestik dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Amerika Serikat.

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tahun 2025 menempatkan Indonesia dalam tekanan perdagangan yang asimetris karena ancaman tarif 32 persen berpotensi mengganggu ekspor, sektor padat karya, dan stabilitas ekonomi domestik. Dalam situasi tersebut, Indonesia secara konseptual dapat menempuh retaliasi, menggunakan forum multilateral, menunda penerimaan kesepakatan, atau mempertahankan ruang kebijakan nasional secara lebih kuat. Namun, kebijakan yang terbentuk justru mengarah pada negosiasi bilateral dan penerimaan *Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade* pada 22 Juli 2025, yang menurunkan tarif menjadi 19 persen tetapi disertai komitmen pembukaan pasar dan penyesuaian hambatan non-tarif oleh Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya analisis terhadap proses pembentukan kebijakan Indonesia dalam menerima kerangka kesepakatan perdagangan resiprokal dengan Amerika Serikat pada tahun 2025.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan utama penelitian ini adalah: Bagaimana proses pembentukan kebijakan Indonesia dalam menerima kerangka kesepakatan perdagangan resiprokal dengan Amerika Serikat pada tahun 2025?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembentukan kebijakan Indonesia dalam menerima kerangka kesepakatan perdagangan resiprokal dengan Amerika Serikat pada tahun 2025

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat menjadi proses pembelajaran bagi penulis sekaligus kontribusi bagi masyarakat akademik dalam memahami dinamika kebijakan negara berkembang ketika menghadapi tekanan perdagangan dari kekuatan besar, khususnya melalui penyajian deskripsi faktual yang lebih lengkap, penyegaran pengetahuan mengenai perkembangan kebijakan tarif Amerika Serikat tahun 2025. Penelitian ini juga dapat membantu mengoreksi pandangan yang terlalu menyederhanakan posisi Indonesia sebagai pihak pasif, dengan memberikan penjelasan yang lebih terstruktur mengenai faktor faktor yang membentuk kebijakan Indonesia menerima kesepakatan tarif yang asimetris.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor perdagangan dalam merumuskan strategi diplomasi yang lebih adaptif ketika menghadapi kebijakan proteksionis mitra dagang utama, serta bagi masyarakat luas yang ingin memahami alasan di balik kebijakan ekonomi politik yang berdampak pada sektor perdagangan dan industri nasional. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberi dasar pemikiran yang lebih kuat untuk memecahkan masalah masalah serupa di masa mendatang, terutama ketika Indonesia

kembali dihadapkan pada tekanan tarif atau negosiasi perdagangan yang tidak seimbang.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penyusunan analisis, peneliti merujuk pada enam literatur utama yang dianggap paling relevan dengan isu yang dikaji. Keenam rujukan tersebut berperan dalam membantu peneliti menempatkan penelitian dalam konteks ilmiahnya serta menegaskan nilai kebaruan dari kajian ini. Adapun karya ilmiah yang digunakan sebagai dasar referensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rotunno dan Ruta (2025) pada penelitiannya yang berjudul *"Trade Partners' Responses to US Tariffs"* membahas bagaimana negara-negara mitra dagang merespons kenaikan tarif impor Amerika Serikat pada tahun 2025 serta bagaimana kebijakan respons tersebut memengaruhi arus perdagangan global maupun kesejahteraan ekonomi.⁷ Dengan menggunakan model perdagangan kuantitatif berbasis kerangka Caliendo–Parro yang mencakup 73 negara dan 20 sektor, penelitian ini mensimulasikan empat skenario kebijakan, yaitu kenaikan tarif AS, penerapan retaliasi tarif oleh mitra dagang, penyesuaian subsidi industri, dan pendalaman integrasi ekonomi melalui perjanjian dagang baru. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan tarif AS mendorong perekonomian domestik Amerika Serikat menuju kondisi yang lebih tertutup, yang tercermin dari penurunan impor sebesar 32 persen dan peningkatan fenomena pengalihan perdagangan dari Tiongkok ke negara lain seperti Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko. Retaliasi tarif terbukti tidak meningkatkan kesejahteraan global dan justru

⁷ Lorenzo Rotunno dan Michele Ruta, "Trade Partners' Responses to US Tariffs," *IMF Working Papers* 2025, no. 147 (Juli 2025): 1, <https://doi.org/10.5089/9798229017008.001>.

memperdalam kerugian bagi Amerika Serikat tanpa menghasilkan manfaat signifikan bagi negara lain. Sementara itu, kebijakan subsidi industri memberikan dukungan terhadap ekspor negara yang menerapkannya, namun tetap menciptakan distorsi tambahan dalam sistem perdagangan. Berbeda dari kedua respons tersebut, strategi pendalaman integrasi ekonomi melalui perjanjian dagang regional atau bilateral justru terbukti sebagai pendekatan yang paling efektif dalam mengurangi dampak negatif dari tarif AS dan bahkan berpotensi meningkatkan kesejahteraan global.

Kontribusi artikel ini bagi penelitian terkait terletak pada penjelasan yang sistematis mengenai mekanisme ekonomi yang muncul akibat proteksionisme Amerika Serikat. Artikel ini menunjukkan bagaimana kenaikan tarif dapat menekan akses pasar mitra dagang, memicu perubahan pola spesialisasi, memengaruhi harga relatif, dan memperkenalkan tekanan kompetitif baru melalui pengalihan arus perdagangan. Temuan tersebut menjadi dasar analitis yang penting untuk memahami bagaimana negara-negara dengan ketergantungan ekspor tertentu menghadapi dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat. Meskipun artikel ini tidak berfokus pada Indonesia, penjelasan mengenai pola pengalihan ekspor Tiongkok dan respons kebijakan negara-negara lain memberikan referensi penting untuk menilai posisi Indonesia dalam dinamika perdagangan global tahun 2025. Hal ini relevan mengingat struktur ekspor Indonesia meliputi sektor-sektor yang juga terlibat dalam kompetisi langsung dengan negara-negara Asia Timur, seperti tekstil, furnitur, dan elektronik.

Ruang analitis yang belum dijawab oleh studi Rotunno dan Ruta menjadi landasan bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi lebih lanjut. Artikel

tersebut beroperasi pada tingkat global sehingga tidak membahas secara terperinci bagaimana kenaikan tarif Amerika Serikat pada tahun 2025 berdampak pada hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat secara bilateral. Selain itu, studi tersebut juga tidak menelaah bagaimana strategi diplomasi ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi hasil negosiasi tarif. Contohnya adalah keberhasilan Indonesia dalam menurunkan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen pada Juli 2025. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih terfokus pada dampak proteksionisme Amerika Serikat terhadap kinerja ekspor Indonesia, perubahan struktur perdagangan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat, serta langkah-langkah diplomasi ekonomi yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif tersebut.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Dinh dan Le Van (2025) pada penelitiannya yang berjudul *“The Impact of “Reciprocal Tariffs” on Developing Countries: A Dynamic Analysis”* memberikan kontribusi teoretis penting dalam memahami dampak kebijakan reciprocal tariffs yang diberlakukan oleh administrasi Trump terhadap perekonomian negara berkembang.⁸ Melalui pendekatan model optimal control dalam kerangka ekonomi terbuka kecil, studi ini menjelaskan secara rinci bagaimana tarif Amerika Serikat yang ditentukan berdasarkan besaran defisit dagang bilateral menghasilkan mekanisme umpan balik yang menekan kinerja ekspor negara mitra. Model tersebut menunjukkan bahwa semakin besar surplus perdagangan suatu negara terhadap Amerika Serikat, semakin tinggi tarif yang diterapkan, sehingga tercipta dinamika tarif yang bersifat endogen terhadap neraca

⁸ Hinh T. Dinh dan Cuong Le Van, “The Impact of ‘Reciprocal Tariffs’ on Developing Countries: a Dynamic Analysis” (Rabat, Morocco, 2025), https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2025-08/RP_08-25_v2.pdf.

perdagangan. Dengan menurunkan kondisi *steady state*, artikel ini memperlihatkan bahwa peningkatan intensitas tarif *reciprocal* akan menurunkan akumulasi modal, mengurangi output jangka panjang, serta menggeser jalur penyesuaian konsumsi pada fase transisi.

Kontribusi utama dari artikel ini terletak pada analisis sensitivitas neraca perdagangan terhadap dua parameter penting, yaitu elastisitas ekspor dan impor. Dinh dan Le Van menemukan bahwa kebijakan tarif dalam negeri dapat menjadi alat untuk memperbaiki neraca perdagangan melalui substitusi impor, namun kebijakan tersebut juga memiliki risiko karena dapat memicu kenaikan tarif *reciprocal* dari Amerika Serikat. Studi ini juga menunjukkan bahwa dalam kondisi ketika elastisitas permintaan impor sangat rendah, negara berkembang masih memiliki ruang kebijakan untuk mempertahankan stabilitas eksternal tanpa menghadapi lonjakan tarif yang lebih tinggi dari Amerika Serikat. Selain itu, artikel tersebut memberikan temuan menarik bahwa penurunan intensitas tarif *reciprocal* dapat meningkatkan akumulasi modal dan memperkuat kapasitas produksi jangka panjang.

Relevansi artikel ini terhadap penelitian penulis terletak pada kemampuannya memberikan landasan teoretis untuk memahami mekanisme ekonomi yang bekerja di balik kebijakan proteksionisme Amerika Serikat pada tahun 2025. Studi ini tidak membahas kasus Indonesia secara khusus, sehingga penelitian penulis mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis dampak nyata dari penerapan tarif resiprokal terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, terutama pada sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Dengan demikian, artikel ini berfungsi sebagai pijakan teoritis yang membantu menjelaskan

hubungan antara dinamika tarif dan keseimbangan perdagangan, sementara penelitian penulis memberikan kontribusi empiris yang lebih kontekstual mengenai implikasi kebijakan proteksionisme era Trump terhadap hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Joost Pauwelyn dengan judul "*How the US Reciprocal Tariff Plan May Save the Global Trading System*" memberikan analisis mendalam mengenai rencana tarif resiprokal Amerika Serikat pada 2025, yang dikenalkan sebagai kebijakan komprehensif untuk membebaskan tarif tambahan sepuluh persen bagi semua mitra dagang, ditambah tarif tambahan berbasis defisit perdagangan bilateral.⁹ Artikel ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan perubahan mendasar dari praktik tarif era Trump sebelumnya yang lebih bersifat sektoral dan ad hoc. Pauwelyn menunjukkan bahwa logika utama di balik tarif resiprokal adalah klaim bahwa struktur perdagangan global tidak lagi mencerminkan keseimbangan konsesi yang adil, mengingat rendahnya tarif rata-rata Amerika dibanding negara lain dan adanya distorsi domestik di banyak negara pesaing seperti subsidi, hambatan non tarif, dan praktik yang menekan konsumsi domestik sehingga membatasi ekspor Amerika. Melalui kerangka historis dan institusional, penulis menegaskan bahwa kebijakan tarif ini, meskipun kontroversial karena bertentangan dengan prinsip Most Favored Nation WTO, juga dapat berfungsi sebagai pemicu perundingan tarif terbesar sejak pendirian WTO.

Kontribusi utama artikel ini terhadap penelitian mengenai proteksionisme Amerika Serikat terletak pada argumentasinya bahwa kebijakan tarif resiprokal

⁹ Joost Pauwelyn, "How the US Reciprocal Tariff Plan May Save the Global Trading System," *World Trade Review* 24, no. 4 (11 Oktober 2025): 509–14, <https://doi.org/10.1017/S1474745625101055>.

tidak semata-mata merupakan tindakan unilateralisme agresif, tetapi juga dapat dipahami sebagai respons terhadap stagnasi sistem perdagangan multilateral selama dua puluh lima tahun terakhir. Pauwelyn menyoroti bahwa WTO dibangun berdasarkan asumsi keseimbangan konsesi pada 1994 yang kini dianggap tidak lagi relevan setelah naiknya peran ekonomi Tiongkok dan beragamnya model ekonomi negara anggota. Artikel ini juga menawarkan perspektif penting bahwa kebuntuan perundingan WTO mendorong Amerika untuk kembali menggunakan tekanan unilateral sebagaimana pernah terjadi pada dekade 1980-an, yang pada akhirnya berujung pada lahirnya WTO itu sendiri. Dalam konteks ini, tarif resiprokal dipandang sebagai instrumen negosiasi yang dapat memicu restrukturisasi global menuju keseimbangan perdagangan baru yang lebih mencerminkan realitas ekonomi kontemporer.

Bagi penelitian mengenai hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat pada era Trump 2025, artikel ini memberi ruang analitis yang sangat signifikan. Pertama, artikel ini membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa tarif Amerika Serikat diberlakukan secara luas kepada semua negara, termasuk Indonesia, dengan logika kebijakan yang tidak lagi berfokus pada isu sektoral tetapi pada ketidakseimbangan perdagangan bilateral. Kedua, referensi Pauwelyn mengenai mekanisme GATT Pasal XXVIII memberikan dasar teoretis untuk memahami bagaimana negara-negara mitra, termasuk Indonesia, dapat merespons kenaikan tarif melalui jalur negosiasi kompensasi maupun retaliasi terbatas. Ketiga, artikel ini membuka ruang penelitian bagi penulis untuk mengisi kekosongan literatur terkait bagaimana negara berkembang seperti Indonesia menghadapi dinamika tarif resiprokal yang pada dasarnya dirancang untuk mengoreksi asimetri struktural

perdagangan global tetapi mensyaratkan kapasitas negosiasi yang jauh lebih besar. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan kerangka konseptual tentang arah proteksionisme Amerika, tetapi juga membantu penulis mengidentifikasi mekanisme kebijakan yang menjadi konteks langsung dari dampak tarif terhadap ekspor Indonesia serta respons diplomasi perdagangan Indonesia pada 2025.

Keempat, artikel karya Fandi Achmad yang berjudul "*ASEAN Under Pressure: Export Exposure and the Implications of U.S. Reciprocal Tariffs*" memberikan analisis komprehensif mengenai dampak rezim tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat pada tahun 2025 terhadap struktur ekspor negara negara ASEAN.¹⁰ Penulis menunjukkan bahwa kebijakan tarif universal sepuluh persen dan tarif tambahan yang bervariasi untuk lebih dari enam puluh negara menciptakan tekanan eksternal signifikan bagi negara negara yang memiliki ketergantungan ekspor terhadap pasar Amerika Serikat. Melalui pemetaan data komposisi ekspor berdasarkan *Standard International Trade Classification* dan perhitungan *Revealed Comparative Advantage*, artikel ini menguraikan tingkat kerentanan masing masing negara ASEAN. Temuan utamanya menunjukkan bahwa Vietnam, Indonesia, dan Thailand berada pada posisi paling rentan karena karakteristik ekspornya yang terfokus pada manufaktur berorientasi ke pasar Amerika Serikat serta tingginya tarif resiprokal yang dikenakan terhadap produk mereka. Sementara itu, negara seperti Brunei, Malaysia, Laos, dan Kamboja lebih terlindungi akibat rendahnya ketergantungan mereka pada pasar Amerika Serikat serta diversifikasi yang lebih kuat menuju pasar China dan intra ASEAN.

¹⁰ Fandi Achmad, "ASEAN Under Pressure: Export Exposure and the Implications of U.S. Reciprocal Tariffs" (Jakarta, Indonesia, 2025), <https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/CSISCOM00525.pdf?download=1>.

Kontribusi utama artikel ini terhadap penelitian adalah penyediaan kerangka empiris untuk memahami pola ketergantungan ekspor kawasan Asia Tenggara pada ekonomi Amerika Serikat. Melalui analisis lintas negara yang menyoroti perbedaan daya saing sektor telekomunikasi, elektronik, tekstil, dan barang perjalanan, artikel ini menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan proteksionis Amerika Serikat berpotensi memicu guncangan eksternal yang tidak merata antar negara. Bagi penelitian mengenai hubungan dagang Indonesia Amerika Serikat pada era pemerintahan Trump tahun 2025, artikel ini memberikan konteks regional yang penting. Analisis tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan bilateral, tetapi juga mengikuti pola kerentanan struktural yang dialami negara negara ASEAN lain yang memiliki orientasi ekspor serupa.

Artikel ini juga membuka ruang penelitian yang dapat diisi oleh penulis skripsi. Meskipun memberikan gambaran luas tentang dampak tarif resiprokal terhadap ASEAN, artikel tersebut tidak membahas secara mendalam hubungan bilateral Indonesia Amerika Serikat secara spesifik. Selain itu, artikel tidak mengkaji bagaimana kebijakan tarif baru mempengaruhi sektor sektor tertentu di Indonesia maupun respons kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia. Ruang inilah yang dapat diisi oleh penelitian skripsi, yaitu menganalisis secara lebih terfokus bagaimana proteksionisme Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump pada tahun 2025 berdampak langsung terhadap perdagangan Indonesia, termasuk pada sektor yang paling terdampak serta strategi diplomasi ekonomi yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam merespons peningkatan tarif yang dikenakan terhadap produk ekspor Indonesia. Dengan demikian, artikel ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan empiris untuk memahami konteks

regional, sementara penelitian skripsi mengisi kekosongan analisis pada dimensi bilateral yang lebih spesifik.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Jan Horas Veryady Purba yang berjudul *Assessing the Impact of US Reciprocal Tariffs on Indonesian Trade Balance and Economic Growth* memberikan analisis empiris langsung mengenai dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap kinerja perdagangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹¹ Melalui pendekatan kuantitatif dengan metode regresi ekonometrika dan data runtut waktu periode 2010 sampai 2024, penelitian ini menguji hubungan antara tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia, kinerja ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat, neraca dagang bilateral, serta pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan tarif impor Amerika Serikat berpengaruh negatif secara signifikan terhadap volume ekspor Indonesia dan memperburuk neraca dagang Indonesia dengan Amerika Serikat, yang kemudian berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Purba memperkirakan bahwa penerapan tarif resiprokal tahun 2025 berpotensi menurunkan surplus perdagangan Indonesia dan mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 5,20 persen menjadi sekitar 5,03 persen, sehingga menegaskan bahwa kebijakan tarif tersebut menjadi sumber tekanan eksternal yang nyata bagi perekonomian Indonesia.

Kontribusi utama artikel ini bagi penelitian terletak pada penyediaan dasar empiris yang kuat untuk memahami bagaimana kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat secara langsung memengaruhi struktur perdagangan dan stabilitas ekonomi

¹¹ Jan Horas Veryady Purba, "Assessing the Impact of US Reciprocal Tariffs on Indonesia Trade Balance and Economic Growth," *International Journal of Advanced Research* 13, no. 05 (31 Mei 2025): 656–66, <https://doi.org/10.21474/IJAR01/20942>.

Indonesia. Berbeda dengan literatur yang berfokus pada simulasi global atau kawasan, Purba memusatkan perhatian pada kasus Indonesia dan menunjukkan secara kuantitatif bagaimana kenaikan tarif mengurangi daya saing ekspor Indonesia, memperlebar defisit atau mengurangi surplus neraca dagang, serta menekan pertumbuhan ekonomi melalui kanal penurunan ekspor dan gangguan terhadap aliran devisa. Dengan demikian, artikel ini membantu memperjelas bahwa kesepakatan tarif resiprokal bukan sekadar isu teknis perdagangan, tetapi berdampak langsung pada kapasitas Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas ekonominya.

Namun, meskipun memberikan gambaran empiris yang rinci mengenai dampak tarif resiprokal terhadap indikator ekonomi Indonesia, artikel Purba belum membahas secara mendalam dimensi politik dan proses pengambilan kebijakan di balik penerimaan Indonesia terhadap struktur kesepakatan yang bersifat tidak seimbang dengan Amerika Serikat. Penelitian tersebut tidak menjelaskan bagaimana konfigurasi kekuatan, struktur ketergantungan dagang, serta kalkulasi politik dan diplomatik pemerintah Indonesia mempengaruhi pilihan untuk menerima pengaturan tarif sembilan belas persen sambil membuka hampir seluruh akses pasar bagi produk Amerika Serikat. Selain itu, artikel tersebut masih menggunakan kerangka teori perdagangan dan pertumbuhan yang bersifat arus utama dan belum mengaitkannya dengan perspektif ketergantungan asimetris yang menjadi fokus artikel ini. Ruang inilah yang akan diisi oleh penelitian skripsi, yakni dengan menempatkan kebijakan Indonesia menerima kesepakatan tarif resiprokal sebagai objek utama analisis, serta menjelaskan logika kebijakan tersebut dalam kerangka teori *Two-Level games* yang menyoroti kebijakan luar negeri

dipengaruhi oleh keterkaitan erat antara politik dalam negeri dan hubungan internasional.

Keenam, Artikel yang ditulis oleh Hanifeh Rigi dan Jeroen F. Warner dengan judul “*Two-level games on the trans-boundary river Indus: obstacles to cooperation*” membahas hambatan kerja sama pengelolaan Sungai Indus antara India dan Pakistan dengan menggunakan kerangka *two-level games*.¹² Artikel ini berargumen bahwa kegagalan atau keterbatasan kerja sama di level internasional tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis atau hubungan antarnegara, melainkan harus dilihat sebagai hasil dari interaksi kompleks antara dinamika politik domestik (*Level II*) dan proses negosiasi internasional (*Level I*). Dalam konteks ini, isu air dipolitisasi dan disekuritisasi oleh berbagai aktor domestik sehingga mempersempit *win-set* masing-masing negara. Di Pakistan, tekanan berasal dari militer, kelompok Islamis, petani, serta komunitas epistemik yang membingkai isu air sebagai ancaman eksistensial. Sementara itu, di India, aktor politik domestik, kepentingan regional di Jammu dan Kashmir, serta opini publik mendorong pemerintah untuk mengambil posisi yang kaku agar tidak dianggap lemah. Dinamika tersebut menyebabkan ruang kompromi di level internasional menjadi sangat terbatas.

Kontribusi utama artikel ini terhadap kajian kebijakan luar negeri terletak pada operasionalisasi konkret kerangka *two-level games*. Artikel ini secara sistematis menunjukkan langkah analitis yang mencakup identifikasi aktor domestik yang relevan, pemetaan preferensi dan kepentingan mereka, serta analisis

¹² Hanifeh Rigi dan Jeroen F. Warner, “Two-level games on the trans-boundary river Indus: obstacles to cooperation,” *Water Policy* 22, no. 6 (1 Desember 2020): 972–90, <https://doi.org/10.2166/wp.2020.090>.

keterkaitan antara tekanan domestik dengan strategi negosiasi di level internasional. Selain itu, artikel ini menegaskan peran strategi *issue-linkage* dan *alliance strategy* sebagai instrumen tawar-menawar di Level I, yang dalam kasus Sungai Indus justru memperdalam kebuntuan karena mempersempit irisan *win-set* antarnegara. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kerangka analitis yang dapat direplikasi dan diadaptasi untuk isu kebijakan lain di luar konflik sumber daya alam.

Artikel ini juga relevan dengan pengembangan teori *two-level games* sebagaimana diperbarui dalam kajian *Foreign Policy Analysis* oleh Eugénia da Conceição-Heldt dan Patrick A. Mello, khususnya terkait penekanan pada peran aktor domestik yang plural, derajat otonomi pengambil kebijakan, serta pentingnya konteks institusional domestik dalam menentukan hasil kebijakan luar negeri. Dengan menggabungkan konsep klasik Putnam dan pembaruan teori tersebut, artikel ini memperlihatkan bagaimana *two-level games* dapat digunakan sebagai alat analisis yang operasional dan empiris, bukan sekadar kerangka konseptual abstrak.

Meskipun demikian, ruang penelitian masih terbuka karena artikel ini berfokus pada isu kerja sama air lintas batas yang sarat dengan dimensi keamanan dan konflik teritorial. Penelitian ini belum mengkaji bagaimana mekanisme *two-level games* bekerja dalam konteks kebijakan ekonomi internasional, khususnya kebijakan tarif. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menerapkan langkah operasionalisasi *two-level games* pada kasus tarif, guna menganalisis bagaimana konfigurasi aktor dan preferensi domestik membentuk *win-set* pemerintah serta memengaruhi posisi dan strategi negosiasi di level

internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan empiris teori *two-level games* sekaligus memberikan kontribusi pada pemahaman politik domestik di balik kebijakan tarif.

1.7 Kerangka Konseptual

Bagian kerangka konseptual berfungsi sebagai jembatan antara rumusan masalah dan analisis, yaitu dengan menjelaskan konsep-konsep kunci serta hubungan antar konsep yang digunakan untuk membaca kebijakan Indonesia dalam menyepakati kesepakatan tarif resiprokal Amerika Serikat tahun 2025. Penelitian ini memposisikan kebijakan Indonesia menerima kerangka kesepakatan (penurunan tarif AS dari 32 persen menjadi 19 persen, sementara Indonesia memberikan pembukaan akses pasar yang sangat luas dan penghapusan berbagai hambatan non-tarif) sebagai fenomena yang tidak dapat dipahami hanya dari kalkulasi ekonomi, melainkan juga dari logika politik dalam negosiasi internasional dan penerimaan domestik.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan teori *Two-Level Games* untuk menjelaskan bahwa proses negosiasi perdagangan adalah permainan simultan pada dua arena. Arena pertama adalah arena internasional, yakni proses tawar-menawar antarnegara yang menghasilkan suatu rancangan kesepakatan. Arena kedua adalah arena domestik, yakni proses penerimaan, persetujuan, dan pengelolaan dukungan di dalam negeri yang menentukan apakah rancangan kesepakatan dapat diimplementasikan dan dipertahankan secara politik. Dengan demikian, kesepakatan internasional yang tampak “tidak seimbang” dapat tetap dipilih apabila secara politik merupakan opsi yang paling mungkin untuk menekan biaya domestik, menjaga stabilitas koalisi, dan menghindari konsekuensi yang dinilai lebih buruk.

1.7.1 *Two-Level Games*

Teori *Two-Level Games* secara klasik dikaitkan dengan Robert D. Putnam dalam artikel “*Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games*” yang memperkenalkan logika “dua arena” (domestik–internasional) dalam memahami negosiasi internasional, yaitu bahwa pemimpin nasional bernegosiasi sekaligus menghadapi tekanan dari mitra luar negeri dan dari konstituen domestik. Putnam memulai argumennya dari kenyataan bahwa politik domestik dan politik internasional pada praktiknya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Kebijakan luar negeri tidak hanya dibentuk oleh dinamika eksternal (misalnya tekanan, ancaman, atau insentif dari negara lain), tetapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah menghadapi kepentingan-kepentingan di dalam negeri yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Putnam menyebut keterkaitan ini sebagai *domestic - international entanglements*, dan ia menilai bahwa kajian yang hanya menyusun daftar pengaruh domestik tanpa kerangka integratif cenderung tidak mampu menjelaskan mekanisme bagaimana interaksi domestik–internasional menghasilkan suatu kebijakan luar negeri. Putnam menawarkan teori ini sebagai *state of the art* yang mengadvokasikan pentingnya relasi antara politik domestik dengan negosiasi internasional dalam perumusan kebijakan luar negeri dari teori-teori tradisional *Foreign Policy Analysis (FPA)*.¹³

Dalam perkembangannya terutama sejak 2000-an hingga sekarang, *Two-Level Games* mengalami perluasan konseptual dalam kajian *International Political Economy (IPE)* dan *Foreign Policy Analysis (FPA)*, dengan perhatian yang lebih

¹³ Robert D. Putnam, “*Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games*,” *International Organization* 42, no. 3 (22 Mei 1988): 427–60, <https://doi.org/10.1017/S0020818300027697>.

kuat pada aktor domestik yang beragam, veto players, bentuk ratifikasi informal, dinamika transnasional, dan sifat negosiasi yang iteratif.¹⁴ Karena itu, penelitian ini tidak berhenti pada formulasi awal *Two-Level Games* (1988), melainkan menggunakan referensi kontemporer yang lebih sesuai untuk menjelaskan kebijakan negara berkembang dalam negosiasi ekonomi internasional, termasuk konteks kesepakatan tarif resiprokal tahun 2025.

Dalam argumen klasik Putnam, negosiasi internasional dipahami sebagai permainan dua tingkat, Level I (*bargaining* internasional) dan Level II (proses domestik untuk menerima/menolak hasil negosiasi). Kesepakatan di Level I hanya mungkin bertahan jika hasilnya berada dalam *win-set*, yakni himpunan kemungkinan kesepakatan yang “dapat diratifikasi” di Level II. Putnam menekankan bahwa besar atau kecilnya *win-set* dipengaruhi oleh tiga determinan utama, yaitu (1) preferensi dan koalisi domestik, (2) institusi politik domestik, dan (3) strategi negosiator. Salah satu implikasi penting dari logika ini adalah “paradoks kelemahan” (*paradox of weakness*), yaitu keterbatasan domestik tertentu dapat menjadi sumber daya tawar karena negosiator dapat meyakinkan pihak luar bahwa ruang komprominya sempit.¹⁵

Kajian *Foreign Policy Analysis (FPA)* kontemporer menolak asumsi bahwa negara selalu bertindak sebagai aktor tunggal yang sepenuhnya unitary dan rasional, karena kebijakan luar negeri pada praktiknya merupakan produk dari pengambil kebijakan manusia, dinamika kelompok, birokrasi, serta kompetisi kepentingan

¹⁴ Eugénia da Conceição-Heldt dan Patrick A. Mello, “*Two-Level Games in Foreign Policy Analysis*,” in *Oxford Research Encyclopedia of Politics* (Oxford University Press, 2017), <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.496>.

¹⁵ Putnam, “Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games.”

domestik. Dengan demikian, kebijakan luar negeri lebih tepat dipahami sebagai hasil proses politik yang melibatkan aktor, institusi, dan kepentingan yang beragam, sehingga analisis kebijakan luar negeri perlu “membuka kotak hitam” negara dan menelusuri mekanisme domestik yang membentuk posisi negosiasi.¹⁶

Kebaruan Heldt dan Mello terletak pada penempatan *two-level games* secara eksplisit dalam *Foreign Policy Analysis*, dengan eksekutif sebagai *chief negotiator* dan *gatekeeper* yang memiliki otonomi relatif, bukan sekadar penerjemah preferensi domestik. Pengembangan ini juga memperluas ratifikasi ke bentuk informal dan menegaskan peran *veto players* serta *institutional constraints* dalam menentukan apakah hasil negosiasi dapat dipertahankan sebagai kebijakan luar negeri. Kebaruan utama *Two-Level Games* kontemporer terletak pada penajaman bahwa “ratifikasi” tidak selalu identik dengan pemungutan suara parlemen, tetapi dapat berbentuk formal maupun informal, misalnya kebutuhan akan penerimaan publik, dukungan koalisi politik, atau legitimasi kebijakan yang dijaga terus-menerus. Selain itu, kajian kontemporer menegaskan pentingnya *veto players* dan *institutional constraints* sebagai penentu apakah sebuah kesepakatan internasional dapat diimplementasikan, bukan sekadar berhenti pada penandatanganan di Level I.¹⁷

Dalam konteks negosiasi ekonomi oleh negara berkembang dan *emerging economies*, riset mutakhir juga menambahkan dua pembaruan penting: (1) perlunya memasukkan mekanisme ratifikasi non-legislatif (*non-institutionalized*

¹⁶ Valerie M Hudson, “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations,” *Foreign Policy Analysis* 1, no. 1 (2005): 1–30, <http://www.jstor.org/stable/24907278>.

¹⁷ da Conceição-Heldt dan Mello, “Two-Level Games in Foreign Policy Analysis.”

ratification) dan (2) memahami negosiasi sebagai permainan yang iteratif, di mana posisi negosiasi dipengaruhi oleh umpan balik domestik serta pembelajaran dari pengalaman perjanjian sebelumnya (*experiential learning*).¹⁸

Mengacu pada kajian *Two-Level Games* dalam *Foreign Policy Analysis* kontemporer yang dirumuskan oleh Eugénia da Conceição-Heldt dan Patrick A. Mello, negosiasi internasional dipahami sebagai “permainan dua tingkat” yang berlangsung secara simultan antara arena internasional dan arena domestik. Dalam kerangka ini, pemimpin/eksekutif diposisikan sebagai *chief negotiator* yang menjalankan perundingan di level internasional, tetapi pada saat yang sama harus memastikan hasil perundingan itu mendapat persetujuan domestik pada tahap ratifikasi. Karena itu, da Conceição-Heldt dan Mello menempatkan eksekutif sebagai *gatekeeper*: aktor sentral yang “menyaring” dan “mengemas” kompromi internasional agar tetap bisa dibawa pulang dan dipertahankan di arena domestik. Mereka juga menekankan bahwa sekalipun *Two-Level Games* memberi tempat besar bagi tekanan domestik, eksekutif tetap memiliki derajat otonomi tertentu dalam pengambilan kebijakan yang tidak bisa sepenuhnya “diturunkan” langsung dari preferensi konstituen.

Berdasarkan da Conceição-Heldt dan Mello, konsep kunci yang membuat kerangka *Two-Level Games* dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni apa proses pembentukan kebijakan Indonesia memilih menerima kesepakatan tarif resiprokal Amerika Serikat pada tahun 2025, adalah :¹⁹

¹⁸ Omar Ramon Serrano Oswald dan Jappe Eckhardt, “New champions of preferential trade? Two-level games in China’s and India’s shifting commercial strategies,” *Review of International Political Economy* 30, no. 2 (4 Maret 2023): 654–77, <https://doi.org/10.1080/09692290.2022.2060278>.

¹⁹ da Conceição-Heldt dan Mello, “Two-Level Games in Foreign Policy Analysis.”

1. *Win-set*

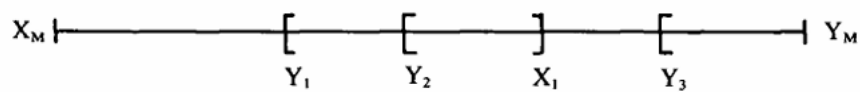
Da Conceição-Heldt dan Mello menjelaskan bahwa *win-set* adalah rentang/sekumpulan kemungkinan hasil negosiasi internasional yang masih dapat memperoleh persetujuan domestik, sehingga bisa diratifikasi dan dijalankan. Dengan logika ini, suatu kesepakatan di level internasional baru “mungkin” terjadi apabila *win-set* para pihak saling beririsan, karena irisan itulah yang menandai hasil yang sama-sama bisa “lulus” domestik di masing-masing negara.²⁰

Da Conceição-Heldt dan Mello juga menegaskan bahwa ukuran *win-set* pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga faktor penentu: (1) preferensi serta koalisi domestik, (2) institusi politik domestik, dan (3) strategi tawar-menawar chief negotiator di level internasional. Dalam konteks penelitian ini, *win-set* Indonesia dapat dipahami sebagai batas kompromi yang masih bisa diterima domestik terkait pertukaran “konsesi pembukaan pasar/hambatan non-tarif” dengan “penurunan tarif AS dari 32 persen ke 19 persen”.

Berdasarkan ketiga faktor yang memengaruhi *win-set*, dapat dipahami bahwa semakin besar *win-set* pada tingkat domestik, semakin besar pula peluang suatu perjanjian internasional untuk memperoleh ratifikasi. Namun, kondisi tersebut juga mengharuskan negara memberikan konsesi yang lebih besar dalam proses negosiasi internasional. Sebaliknya, *win-set* yang lebih kecil cenderung memperkuat posisi tawar negara dalam perundingan internasional, tetapi meningkatkan kemungkinan terjadinya kegagalan ratifikasi di tingkat domestik. Kegagalan ratifikasi tersebut dapat menyebabkan pembatalan proses ratifikasi oleh

²⁰ da Conceição-Heldt dan Mello.

pihak perwakilan, sehingga kesepakatan pada Level I turut batal apabila hasil perundingan dianggap tidak memenuhi kepentingan pihak domestik.²¹ Oleh sebab itu, perubahan strategi maupun kepentingan yang dimiliki negosiator dan konstituen dapat mempersempit *win-set* hingga mencapai batas minimum. Untuk menjelaskan dinamika perubahan ukuran *win-set*, Putnam menggambarkan proses peningkatan dan penurunan *win-set* melalui ilustrasi berikut:



Gambar 1. 1 Efek Reduksi *Win-set* Menurut Putnam

Sumber: Putnam, “*Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level games*,” *International Organization* 42, no 3, 1988: 440

X dan Y menggambarkan dua negara yang terlibat dalam suatu proses negosiasi internasional. Sementara itu, X_M dan Y_M menunjukkan tingkat kepentingan maksimum atau perkiraan batas tertinggi kesepakatan yang masih memungkinkan untuk diratifikasi oleh masing-masing negara. Sebaliknya, X_1 dan Y_1 merepresentasikan tingkat kepentingan minimum atau batas terendah kesepakatan yang masih dapat diterima dan diratifikasi oleh kedua pihak. Selanjutnya, Y_2 menunjukkan kepentingan atau preferensi Y yang berada dalam *win-set* X, yakni pada batas minimum kesepakatan yang masih dapat diterima oleh X. Adapun Y_3 menggambarkan kepentingan Y yang berada di luar ruang kesepakatan X sehingga tidak dapat disetujui karena dinilai tidak memiliki peluang untuk memperoleh ratifikasi.

²¹ Putnam, “Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games.”

2. Ratifikasi formal–informal

Menurut da Conceição-Heldt dan Mello, syarat ratifikasi merupakan mata rantai teoretis yang krusial karena menghubungkan arena internasional (perundingan) dengan arena domestik (persetujuan).²² Mereka menegaskan bahwa ratifikasi dapat berbentuk formal, misalnya persyaratan pemungutan suara/penyetujuan legislatif pada kebijakan tertentu. Namun ratifikasi juga bisa berbentuk informal, misalnya keterikatan pemerintah pada indikator penerimaan publik seperti opini publik atau tingkat persetujuan (*approval ratings*) yang turut dipertimbangkan pembuat kebijakan. Dalam artikel yang ditulis da Conceição-Heldt dan Mello, proses globalisasi dan meningkatnya kontestasi atas kesepakatan internasional membuat pemerintah semakin berada di bawah tekanan parlemen, pengadilan, kelompok bisnis dan buruh, serta NGO untuk membenarkan konsesi yang diberikan dalam negosiasi internasional, terutama bila konsesi itu sulit ditampilkan sebagai keuntungan kesejahteraan yang nyata bagi warga.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, konsep ratifikasi formal–informal membantu menelusuri bahwa kebijakan Indonesia menerima kesepakatan asimetris bisa dipahami sebagai upaya pemerintah memilih opsi yang paling “bisa diloloskan”, bukan hanya secara prosedural, tetapi juga secara legitimasi, dalam menghadapi ancaman biaya ekonomi-politik yang lebih besar jika tarif tinggi tetap berlaku. (Penerapan kasus).

3. *Veto players dan institutional constraints*

²² da Conceição-Heldt dan Mello, “Two-Level Games in Foreign Policy Analysis.”

Da Conceição-Heldt dan Mello menyatakan bahwa pendekatan *Two-Level Games* (dalam FPA) mengakui signifikansi domestic *veto players* dan *institutional constraints* dalam membentuk hasil kebijakan luar negeri.²³

Veto players adalah aktor politik yang persetujuannya wajib untuk mengubah *status quo* kebijakan, sehingga tanpa persetujuan mereka, perubahan tidak bisa dilakukan. Dalam teori George Tsebelis, *veto players* bisa berupa aktor individu atau kolektif (misalnya presiden, dua kamar parlemen, atau partai koalisi) yang memiliki kekuasaan formal untuk menghentikan perubahan kebijakan. Semakin banyak jumlah *veto players* dan semakin jauh perbedaan preferensi mereka, biasanya makin sulit dan lambat proses perubahan kebijakan, sehingga menghasilkan stabilitas kebijakan yang tinggi.²⁴

Institutional constraints adalah seperangkat aturan, prosedur, dan struktur kelembagaan yang membatasi sekaligus mengarahkan tindakan aktor politik dalam suatu sistem. Batasan ini bisa berupa aturan formal (konstitusi, undang-undang, prosedur pengambilan kebijakan) maupun informal (norma, kebiasaan, konvensi) yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aktor politik, sehingga membentuk pilihan, strategi, dan hasil kebijakan mereka. Dalam literatur politik, institutional constraints dipandang sebagai “aturan main” yang bersifat historis dan relatif tahan lama, yang

²³ da Conceição-Heldt dan Mello.

²⁴ Adam R. Brown, “Tsebelis: Veto Players,” Political Science Notes, 2002, https://adambrown.info/p/notes/tsebelis_veto_players.

menjelaskan mengapa sistem politik tertentu cenderung lebih mudah atau lebih sulit mengalami perubahan kebijakan.²⁵

Mereka menjelaskan bahwa institusi politik domestik yang relevan mencakup: kapasitas kelompok kepentingan memengaruhi pemerintah, mekanisme berbagi kekuasaan eksekutif–legislatif, serta jumlah *veto players* yang dapat menghambat perubahan kebijakan. Dalam uraian mereka, semakin banyak titik veto dan mekanisme *power-sharing* yang harus dipenuhi, maka semakin tinggi ketidakpastian apakah kesepakatan internasional akan benar-benar “jalan”, dan kondisi ini dapat meningkatkan kompleksitas sekaligus risiko dalam perundingan.

Dalam penelitian ini, konsep *veto players* dan *institutional constraints* dapat dipakai untuk mengidentifikasi aktor/arena domestik mana yang berpotensi menjadi “penghambat” atau “pemaksa perubahan desain kesepakatan” (misalnya kementerian/instansi implementor, parlemen, kelompok industri tertentu, atau pembentuk opini yang meningkatkan biaya legitimasi). (Penerapan kasus).

4. Strategi negosiator

Da Conceição-Heldt dan Mello menggarisbawahi bahwa *chief negotiator* harus bernegosiasi secara simultan dengan pihak luar dan dengan konstituen domestik.²⁶ karena itu, keberhasilan negosiasi internasional terkait erat dengan kemampuan mengelola keterbatasan domestik. Mereka menjelaskan bahwa pelanggaran

²⁵ Tiberiu Dragu dan Hannah K. Simpson, “Veto players, policy change, and institutional design,” *Research & Politics* 4, no. 3 (9 Juli 2017), <https://doi.org/10.1177/2053168017722704>.

²⁶ da Conceição-Heldt dan Mello, “Two-Level Games in Foreign Policy Analysis.”

komitmen domestik oleh negosiator dapat meningkatkan risiko *voluntary defection*, sedangkan kegagalan memperoleh ratifikasi setelah penandatanganan kesepakatan dapat menimbulkan *involuntary defection*.

Dalam teori *two-level games*, semakin kecil *win-set*, semakin besar risiko *involuntary defection* karena ruang kompromi yang lolos domestik makin sempit.²⁷

Da Conceição-Heldt dan Mello juga menguraikan paradoks bahwa *win-set* yang besar cenderung memudahkan penutupan negosiasi, tetapi sekaligus dapat melemahkan posisi tawar, sedangkan keterbatasan domestik (*win-set* kecil) kadang dapat dieksploitasi sebagai sumber daya tawar. Mereka bahkan mendorong penelitian untuk melihat kondisi ketika pemimpin sengaja “mengikat tangan” di domestik (*tie their own hands*) agar dapat memanfaatkan keterbatasan tersebut dalam negosiasi internasional.

Dalam kasus Indonesia–AS 2025, konsep strategi negosiator membantu membaca kemungkinan bahwa konsesi besar dipilih sebagai strategi untuk memastikan hasil yang “cukup” (tarif turun ke 19 persen) berada dalam *win-set* yang bisa dipertahankan di domestik, sekaligus mengurangi risiko kegagalan implementasi yang dapat memperburuk posisi Indonesia.

5. Dinamika aktor dan level analisis: domestik–internasional–transnasional

Da Conceição-Heldt dan Mello menekankan bahwa analisis kebijakan luar negeri pada praktiknya kompleks karena melibatkan banyak aktor, institusi, dan

²⁷ Putnam, “Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games.”

interaksi di level internasional, domestik, dan juga transnasional.²⁸ Dalam pemetaan mereka, aktor domestik yang relevan dapat mencakup politisi eksekutif, parlemen yang meratifikasi perjanjian, serta birokrasi yang mengelola sektor kebijakan terkait. Mereka juga menegaskan bahwa para aktor tersebut membawa kepentingan yang beragam, misalnya tujuan kesejahteraan (*welfare*), keamanan, tujuan kebijakan, atau kepentingan elektoral, sehingga preferensi “nasional” adalah hasil agregasi/kompetisi politik, bukan sesuatu yang otomatis tunggal. Dalam pembahasan mereka tentang dinamika *governance* kontemporer, da Conceição-Heldt dan Mello juga menunjukkan bahwa birokrat internasional dan NGO makin sering tampil sebagai aktor yang relevan dalam arena negosiasi dan konsultasi kebijakan global.

Konsep “aktor lintas level” ini relevan untuk penelitian ini karena kebijakan memberi konsesi besar dapat dipengaruhi oleh konfigurasi tekanan dan dukungan yang datang sekaligus dari aktor domestik (misalnya pelaku ekspor padat karya, industri yang rawan kompetisi impor), aktor internasional (pemerintah AS), dan dinamika transnasional (jejaring bisnis, standar/regulasi, serta arus opini/advokasi yang membentuk biaya legitimasi).

6. Dimensi waktu dan iterasi negosiasi

Da Conceição-Heldt dan Mello menilai bahwa banyak aplikasi *Two-Level Games* cenderung statis, sehingga penguatan analisis dapat dilakukan dengan menambahkan dimensi temporal agar negosiasi dipahami sebagai proses historis dan berurutan (process-oriented).²⁹ Dalam pembahasan mereka tentang “missing

²⁸ da Conceição-Heldt dan Mello, “Two-Level Games in Foreign Policy Analysis.”

²⁹ da Conceição-Heldt dan Mello.

time dimension”, negosiasi perdagangan dapat dipengaruhi oleh faktor waktu seperti *time pressure*, *best alternatives to a negotiated agreement (BATNA)*, serta sifat permainan tawar-menawar yang repetitif (*repetitive bargaining games*) dan perubahan strategi sepanjang putaran negosiasi.³⁰

Bagi penelitian ini, dimensi ini membantu menjelaskan bahwa kebijakan menerima paket konsesi besar tidak harus dibaca sebagai kebijakan “sekali jadi”, tetapi sebagai hasil penyesuaian strategi Indonesia terhadap tekanan waktu dan perubahan kalkulasi biaya–manfaat sepanjang rangkaian perundingan tarif 2025.

1.8 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis yang diterapkan untuk menghimpun, mengolah, dan menafsirkan suatu fenomena secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagaimana dipahami oleh Creswell, yang memandangnya sebagai rangkaian metode penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna-makna yang dibangun oleh individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena atau masalah sosial melalui proses pengumpulan data secara mendalam dalam lingkungan konteksnya yang alami, serta analisis data yang bersifat induktif dari pengamatan lapangan menuju temuan-temuan tematik yang lebih luas.³¹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan persepsi, motivasi, dan interpretasi subjek penelitian terhadap realitas sosial melalui data deskriptif berbasis kata-kata seperti analisis dokumen kebijakan, laporan resmi,

³⁰ Peter J Carnevale, “Strategic Time in Negotiation,” *Current Opinion in Psychology*, 2018, <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2018.12.017>.

³¹ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5 ed. (SAGE Publications, 2018).

berita, dan narasi historis dari sumber literatur sekunder, sehingga menghasilkan pemahaman yang kaya dan kontekstual daripada sekadar pengukuran numerik. Dalam konteks skripsi ini yang mengkaji bagaimana proses pembentukan kebijakan Indonesia dalam menerima kesepakatan tarif resiprokal 19 persen dengan Amerika Serikat tahun 2025, pendekatan kualitatif melalui literature research menjadi pilihan tepat karena memungkinkan eksplorasi holistik atas dinamika politik domestik, preferensi koalisi aktor pemerintah dan sektor industri, serta strategi negosiasi yang membentuk *win-set* kebijakan luar negeri Indonesia.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan bentuk analisis eksplanatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dikaitkan oleh aktor individu maupun kelompok terhadap masalah sosial atau fenomena yang terjadi, melalui proses pengumpulan data deskriptif dalam konteks alamiah, analisis induktif dari detail ke tema umum, serta interpretasi peneliti terhadap makna data.³² Melalui penelitian ini, hasil yang diharapkan adalah tersusunnya gambaran hubungan sebab-akibat di antara variabel-variabel fenomena yang dikaji. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penulis berupaya mengkaji secara menyeluruh dinamika domestik maupun internasional yang melatarbelakangi pertimbangan Indonesia dalam menerima kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat pada tahun 2025.

1.8.2 Batasan Penelitian

³² Creswell dan Creswell.

Penelitian ini dibatasi pada periode 2 April 2025 sampai 22 Juli 2025, yakni sejak Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan *Liberation Day tariffs* melalui *Executive Order 14257* hingga diumumkannya *Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade*. Batasan ini ditetapkan agar penelitian tetap terfokus pada proses terbentuknya kebijakan Indonesia menerima kerangka kesepakatan pada tahun 2025. Dalam penelitian ini, istilah “kesepakatan 2025” digunakan untuk merujuk pada *Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade* yang diumumkan pada 22 Juli 2025. Penggunaan istilah tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa perjanjian final telah ditandatangani pada tahun yang sama, sebab *Agreement on Reciprocal Trade* antara Indonesia dan Amerika Serikat baru difinalisasi dan ditandatangani pada 19 Februari 2026. Dengan pembatasan ini, fokus penelitian tetap berada pada proses pengambilan kebijakan Indonesia dalam menerima kerangka kesepakatan pada 2025.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis menurut Creswell merujuk pada fenomena atau sistem terbatas (*bounded system*) yang diteliti secara mendalam dalam konteks kualitatif, seperti studi kasus, di mana fokusnya adalah satu kasus tunggal atau multipel yang dibatasi oleh waktu, tempat, atau aktivitas tertentu untuk menggali makna kompleks secara holistik.³³ Unit analisis dalam penelitian ini adalah Indonesia sebagai negara, khususnya perilaku kebijakan Indonesia dalam merespons tekanan tarif Amerika Serikat dan kebijakan menerima kesepakatan tarif resiprokal Amerika Serikat.

³³ Creswell dan Creswell.

Dengan demikian, unit analisis berfungsi sebagai variabel dependen, yaitu respons negara Indonesia. Unit eksplanasi menurut Creswell merupakan elemen-elemen penjelas atau faktor kontekstual yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami dinamika unit analisis melalui analisis induktif dari data deskriptif.³⁴ Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah kebijakan proteksionisme Amerika Serikat tahun 2025, termasuk penerapan tarif 32 persen, struktur tarif resiprokal 19 persen, serta tekanan negosiasi yang tercantum dalam dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat. Unit eksplanasi menjadi variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan mengapa Indonesia merespons dengan cara tertentu.

Tingkat analisis (*level of analysis*) menurut Kenneth Waltz merujuk pada hierarki penjelasan fenomena hubungan internasional yang mencakup tiga tingkatan utama, yaitu individu, negara, dan sistem internasional, untuk menentukan penyebab utama perilaku aktor dalam sistem global.³⁵ Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua tingkatan, yaitu tingkat sistem internasional (*Level I*) dan tingkat negara atau domestik (*Level II*), sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori *two-level game* Robert D. Putnam.

Pada *Level I* (tingkat sistem internasional/global), analisis difokuskan pada dinamika sistem perdagangan internasional yang membentuk tekanan eksternal terhadap Indonesia, khususnya kebijakan proteksionisme Amerika Serikat tahun 2025, termasuk penerapan tarif impor 32 persen, skema tarif resiprokal 19 persen, serta proses negosiasi bilateral yang menyertainya. Tingkat ini memosisikan sistem internasional sebagai arena interaksi antarnegara yang membatasi pilihan kebijakan

³⁴ Creswell dan Creswell.

³⁵ N. Waltz, "Three Levels of Analysis" 12, no. 3 (1960): 453–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2009401>.

Indonesia. Sementara itu, Level II (tingkat negara/domestik) menempatkan Indonesia sebagai aktor negara yang harus merespons tekanan internasional dengan mempertimbangkan dinamika internal, seperti struktur ekonomi nasional, kepentingan sektor industri padat karya, serta kalkulasi strategis pemerintah dalam kebijakan perdagangan luar negeri. Pada tingkat ini, analisis difokuskan pada pembentukan *win-set* domestik yang menjelaskan mengapa kesepakatan tarif tahun 2025 dapat diterima sebagai respons kebijakan yang rasional. Dengan mengintegrasikan *Level I* dan *Level II*, penelitian ini menjelaskan bagaimana tekanan sistem internasional berinteraksi dengan kepentingan domestik Indonesia dalam proses pengambilan kebijakan perdagangan internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Studi kepustakaan menurut Sugiyono didefinisikan sebagai penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, laporan, dan dokumen resmi untuk mengumpulkan data secara sistematis guna menganalisis fenomena secara mendalam tanpa pengumpulan data primer di lapangan.³⁶ Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data dari buku, jurnal internasional bereputasi, working paper yang relevan, laporan kebijakan, dokumen pemerintah Amerika Serikat seperti *Executive Order* dan *fact sheets*, publikasi lembaga penelitian seperti IMF, CSIS, dan IFG Progress, serta artikel berita dari media kredibel. Teknik ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan dan tidak memerlukan pengumpulan data

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, mencakup data tekstual seperti isi perjanjian perdagangan, laporan analisis ekonomi, data ekspor impor, serta publikasi resmi pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Data primer dalam penelitian ini berupa dokumen resmi yang merekam langsung kebijakan dan proses negosiasi pada tahun 2025, terutama *Executive Order 14257*, *Executive Order 14266*, *Executive Order 14316*, *Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade*, serta *Fact Sheet: The United States and Indonesia Reach Historic Trade Deal*. Sementara itu, dokumen yang terbit setelah periode penelitian, seperti *Fact Sheet: Trump Administration Finalizes Trade Deal with Indonesia* dan *Frequently Asked Questions Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat*, digunakan secara terbatas sebagai sumber klarifikasi retrospektif untuk menjelaskan perkembangan pasca-2025, bukan sebagai dasar utama dalam menyusun kronologi perundingan tahun 2025. Sedangkan data sekunder mencakup artikel akademik seperti *IMF Working Paper Rotunno & Ruta (2025)*, analisis CSIS Indonesia, serta artikel *Project Syndicate* mengenai evaluasi kesepakatan perdagangan Indonesia Amerika Serikat.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif menurut Creswell merupakan proses induktif yang melibatkan pengorganisasikan data deskriptif, pembacaan berulang untuk memahami makna, pengkodean data menjadi tema-tema yang muncul, representasi tema dalam bentuk narasi atau visual, serta interpretasi temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui pembentukan general themes dari particulars. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Creswell untuk mengurai proses pembentukan kebijakan Indonesia dalam

menyepakati tarif resiprokal 19 persen dengan Amerika Serikat tahun 2025, yang mencakup tiga tahapan utama yaitu pengorganisasian data, pengkodean tematik, dan interpretasi:³⁷

1. Pengorganisasian Data

Pengorganisasian data merupakan proses awal menyusun data tekstual dari dokumen resmi, laporan kebijakan, dan literatur sekunder agar siap untuk analisis mendalam. Data diorganisasi berdasarkan kata kunci utama seperti "tarif resiprokal 19 persen", "ancaman tarif 32 persen", "*win-set* Indonesia", "Level II politics", "koalisi domestik industri", "negosiasi Prabowo-Trump", dan "*two-level game*". Penggunaan kata kunci tersebut memungkinkan peneliti menyaring informasi relevan dari *Joint Statement US-Indonesia*, *Executive Order 14257*, *IMF Working Paper*, serta analisis CSIS tentang dinamika perdagangan bilateral.

2. Pengkodean Tematik

Setelah pengorganisasian data, tahap pengkodean tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data. Proses ini menghasilkan tema-tema utama seperti "tekanan proteksionisme Trump", "kepentingan industri padat karya Indonesia", "kalkulasi ekonomi domestik", dan "strategi diplomasi bilateral". Penyajian tema-tema ini dalam bentuk narasi terstruktur memberikan gambaran jelas tentang interaksi antara faktor eksternal (kebijakan AS) dan internal (dinamika domestik Indonesia) yang membentuk kebijakan penerimaan tarif 19 persen.

³⁷ Creswell dan Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

3. Interpretasi dan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah interpretasi tema-tema untuk menjawab rumusan masalah mengenai mekanisme dan tahapan pembentukan kebijakan Indonesia menerima kesepakatan tarif resiprokal. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan temuan tematik dengan kerangka teori *two-level game* Putnam, menjelaskan bagaimana *win-set* kebijakan Indonesia terbentuk dari interaksi Level I (negosiasi bilateral) dan Level II (koalisi domestik), sehingga menghasilkan kesimpulan kausal tentang respons strategis Indonesia terhadap tekanan proteksionisme AS tahun 2025.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

berisi uraian mengenai latar belakang yang menjelaskan konteks munculnya kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dan respons Indonesia terhadap tekanan tarif tersebut. Bab ini juga memuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Secara keseluruhan, bab ini memberikan gambaran umum mengenai arah analisis dan cakupan penelitian.

BAB II : DINAMIKA KERJASAMA EKONOMI INDONESIA – AMERIKA SERIKAT

menyajikan gambaran faktual mengenai konteks yang melatarbelakangi kebijakan yang diteliti. Bab ini membahas keadaan dan karakteristik sistem perdagangan Indonesia Amerika Serikat, kondisi ekonomi sektor yang terdampak oleh tarif, serta struktur hubungan dagang yang menjadikan Indonesia rentan

terhadap kebijakan proteksionisme Amerika Serikat. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kondisi institusi, aktor, serta aturan perdagangan yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan tarif resiprokal pada tahun 2025.

BAB III : PROSES NEGOSIASI DAN KERANGKA KESEPAKATAN PERDAGANGAN RESIPROKAL INDONESIA–AMERIKA SERIKAT TAHUN 2025

Bab ini menguraikan dinamika interaksi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam proses negosiasi perdagangan pada tahun 2025 yang berujung pada pengumuman kerangka kesepakatan pada 22 Juli 2025. Pembahasan difokuskan pada faktor-faktor yang memengaruhi respons Indonesia, seperti tekanan eksternal dari kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, ketergantungan perdagangan, pertimbangan politik dan ekonomi domestik, serta perbandingan respons negara lain di kawasan. Selain itu, bab ini memaparkan kronologi negosiasi, posisi tawar masing-masing negara, dan dinamika hubungan kedua aktor dalam proses pembentukan kerangka kesepakatan tersebut.

BAB IV : PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENERIMA KERANGKA KESEPAKATAN PERDAGANGAN RESIPROKAL DENGAN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2025

Bab ini merupakan bagian utama yang memuat analisis mendalam terhadap kebijakan Indonesia menerima kerangka kesepakatan perdagangan resiprokal dengan Amerika Serikat pada tahun 2025. Analisis dilakukan dengan mengaplikasikan teori *Two-Level Games* untuk menjelaskan bagaimana tekanan internasional, preferensi domestik, pertimbangan ekonomi politik, dan strategi

negosiasi pemerintah berinteraksi dalam membentuk pilihan kebijakan Indonesia. Dengan demikian, bab ini tidak hanya mendeskripsikan fakta empiris, tetapi juga menjelaskan logika politik yang membuat opsi penerimaan kerangka kesepakatan dipandang paling mungkin dan paling dapat dipertahankan pada saat itu.

BAB V : PENUTUP

berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian serta sumbangan pemikiran yang diberikan melalui penelitian ini. Bab ini merangkum temuan utama mengenai proses pembentukan kebijakan Indonesia menerima kesepakatan tarif AS tahun 2025, serta memberikan implikasi teoretis dan praktis sesuai dengan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga dapat memuat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pembuat kebijakan.

